

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karna atas rahmat dan karunianya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2018-2013 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 atay (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebiakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusuin dengan berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD juga disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana program, kegiatan dan tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka –pencapaian visi dan misi organisasi.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan Renstra ini, untuk itu kami mengharapkan masukan demi memperbaiki dokumen Renstra ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi semua unit-unit organisasi komponen Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pontianak, 26 Desember 2019

SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



MUHAMMAD RIDWAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Bedasarkan **Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** bahwa DPRD Provinsi terdiri atas Anggota Partai Politik peserta PEMILU yang dipilih melalui Pemilihan Umum. DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Anggota DPRD Provinsi adalah Pejabat Daerah Provinsi.

DPRD Provinsi mempunyai fungsi :

- a. pembentukan PERDA;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.

Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, DPRD Provinsi menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi pembentukan PERDA Provinsi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara :

- a. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan PERDA Provinsi;
- b. mengajukan usul rancangan PERDA Provinsi; dan
- c. menyusun program pembentukan PERDA bersama Gubernur.

Program pembentukan PERDA Provinsi memuat daftar urutan dan prioritas rancangan PERDA Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan PERDA, DPRD melakukan koordinasi dengan Gubernur.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan PERDA tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan RKPD;
- b. membahas rancangan PERDA Provinsi tentang APBD Provinsi;
- c. membahas rancangan PERDA Provinsi tentang Perubahan APBD Provinsi; dan
- d. membahas rancangan PERDA Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan PERDA Provinsi dan Peraturan Gubernur;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD Provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya DPRD Provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan. DPRD Provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk PERDA Provinsi bersama Gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan PERDA Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA Provinsi dan APBD Provinsi;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah Provinsi;
- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Provinsi; dan

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi tentang Tata Tertib.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi, dibentuk Sekretariat DPRD Provinsi. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD Provinsi, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi ditetapkan dengan PERDA Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas Persetujuan Pimpinan DPRD Provinsi setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi. Sekretaris DPRD Provinsi dan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2019, melalui **Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 2 Tahun 2019** telah ditetapkan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023**. Untuk itu sesuai dengan **PERMENDAGRI 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**, Perangkat Daerah diminta menetapkan RENSTRA paling lambat 1 (satu) bulan setelah PERDA tentang RPJMD ditetapkan.

## 1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2008-2028 Provinsi Kalimantan Barat;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, untuk menghasilkan rumusan tujuan strategi, arah kebijakan dan program

pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dimaksudkan juga untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat) dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Menjabarkan agenda pembangunan dan program Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 untuk mewujudkan tercapainya program dan kegiatan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan guna memberikan pelayanan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi baik antar unit kerja dalam Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, maupun Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
5. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sedangkan sistematika penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dapat diilustrasikan, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR  
RINGKASAN EKSEKUTIF  
DAFTAR ISI

#### BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang  
Menjelaskan pengertian ringkas tentang RENSTRA, proses penyusunan RENSTRA, alasan mengapa RENSTRA ini disusun, resiko jika RENSTRA tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.
- 1.2 Landasan Hukum  
Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RENSTRA pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.
- 1.3 Maksud dan Tujuan  
Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RENSTRA dan tujuan penyusunan dokumen RENSTRA bagi OPD yang bersangkutan.
- 1.4 Sistematika Penulisan  
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RENSTRA terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

#### BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah  
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap

KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (hasil pengisian). Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD

#### 3.3. Telaahan Rentsra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

### BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan, Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kerjanya.



**BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

**BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

**BAB 7 . KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RENSTRA OPD

**BAB 8. PENUTUP**

**LAMPIRAN**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas “*Melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang pelayanan kepada DPRD dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Berdasarkan **Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016** telah mengubah Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Daerah tersebut, selanjutnya telah ditindaklanjuti melalui **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat**.

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin yang oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai **TUGAS** menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat mempunyai **FUNGSI** :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Pimpinan DPRD.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum dan Keuangan;
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN** membawahi :

- Sub Bagian Program dan Keuangan;
- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- Sub Bagian Rumah Tangga;

**BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN** membawahi :

- Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
- Sub Bagian Peridangan dan Risalah; dan
- Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.

**BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN** membawahi

:

- Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
- Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
- Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

Di samping itu, terdapat Tenaga Ahli. Hal ini sebagaimana diatur di dalam **Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** bahwa *dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD Provinsi, dibentuk Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli*. Tenaga ahli dimaksud adalah Tenaga Ahli yang diperuntukkan bagi 8 (delapan) Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar, terdiri dari :

1. **Fraksi PDI-Perjuangan;**
2. **Fraksi Partai GOLKAR;**
3. **Fraksi Partai Demokrat;**
4. **Fraksi Partai GERINDRA;**
5. **Fraksi Partai NasDem;**
6. **Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN);**
7. **Fraksi NKB/Nurani Keadilan Bangsa;**
8. **Fraksi PERKASA/Persatuan Keadilan Sejahtera.**

Ke-8 Tenaga Ahli Fraksi tersebut, melalui Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar memperoleh hak pembayaran honorarium setiap bulannya (permanen setiap Tahun Anggaran).

Di luar tenaga Ahli Fraksi, DPRD Provinsi Kalbar dalam pembahasan PANSUS RAPERDA/Non RAPERDA juga difasilitasi Tenaga ahli dari Perguruan Tinggi/Swasta yang berkompeten di bidangnya dengan materi PANSUS yang dibahas. Melalui Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar, Tenaga Ahli PANSUS ini juga memperoleh hak pembayaran honorarium setelah selesainya pembahasan RAPERDA/Non RAPERDA tersebut (temporer).

Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar juga dibantu dengan Kelompok Jabatan Fungsional (JAFUNG). Pada saat ini, di Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar yang ada hanya jabatan fungsional arsiparis atas nama **Sdr. LITA APRIANI, S.Sos.**

Atas dasar tugas dan fungsi yang ada, struktur Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

#### **1. Sekretaris DPRD (Eselon II a)**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan DPRD Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan tugas Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. *penetapan program kerja Sekretariat DPRD sebagai bahan pelaksanaan tugas;*
- b. *penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;*
- c. *penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;*

- d. *pengkoordinasian kegiatan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. *penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;*
- g. *pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan kesekretariatan DPRD;*
- h. *pelaksanaan evaluasi dan laporan terhadap tugas dan fungsi kesekretariatan DPRD;*
- i. *pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Gubernur.*

**2. Kepala Bagian (Eselon III.a), terdiri dari :**

**a. Kepala Bagian Umum Dan Keuangan**

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan di bidang Umum, Program dan Keuangan, Tata Usaha dan Kepegawaian, serta urusan Rumah Tangga, sedangkan fungsinya sebagai berikut :

- *penyusunan program kerja di bidang umum dan keuangan;*
- *pelaksanaan urusan di bidang program dan keuangan;*
- *pelaksanaan urusan di bidang tata usaha dan kepegawaian;*
- *pelaksanaan urusan di bidang rumah tangga;*
- *pelaksanaan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi peningkatan kapasitas Anggota DPRD, pengelolaan tenaga ahli, fasilitasi Fraksi DPRD, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana DPRD, pengelolaan aset, penyusunan dan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD, verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan sekretariat DPRD;*

- penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD, verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD, mengkoordinir dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD, evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD, serta penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan;
- pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Bagian Umum dan Keuangan;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan membawahi :

- **Sub Bagian Program dan Keuangan;**
- **Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan**
- **Sub Bagian Rumah Tangga.**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

**Sub Bagian Program dan Keuangan** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang program dan keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. **Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsinya. **Sub Bagian Rumah Tangga** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang pengembangan HUMAS, dokumentasi dan perpustakaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan**

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan di bidang kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai **FUNGSI**, yaitu :

- *penyusunan program kerja di bidang Persidangan dan perundang-undangan;*
- *pelaksanaan urusan di bidang kajian perundang-undangan;*
- *pelaksanaan urusan di bidang persidangan dan risalah;*
- *pelaksanaan urusan di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan dan publikasi;*
- *pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik serta draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;*
- *pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan, mengumpulkan bahan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, menyusun risalah rapat, mengkoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, serta verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan risalah rapat;*
- *pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persidangan dan perundang-undangan;*
- *pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;*

- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang persidangan dan perundang-undangan;
- pelaksanaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persidangan dan perundang-undangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain di bidang persidangan dan perundang-undangan yang diserahkan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi :

- **Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;**
- **Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan**
- **Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

*Sub Bagian Kajian Perundang-undangan* mempunyai tugas mengumpulkan, dan mengolah bahan kebijakan di bidang kajian perundang-undangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. *Sub Bagian Persidangan dan Risalah* mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang persidangan dan risalah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. *Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi* mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c. Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan**

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan di bidang penganggaran, fasilitasi pengawasan serta kerjasama dan aspirasi.



Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai **FUNGSI**, yaitu :

- *penyusunan program kerja di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;*
- *pelaksanaan urusan di bidang fasilitasi penganggaran;*
- *pelaksanaan urusan di bidang fasilitasi pengawasan;*
- *pelaksanaan urusan di bidang kerjasama dan aspirasi;*
- *pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS/KUPA PPAS) Perubahan, pembahasan APBD/APBD Perubahan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, aspirasi masyarakat, pelaksanaan penegakan kode etik DPRD, dukungan pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, persetujuan kerjasama daerah, serta fasilitasi, verifikasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;*
- *pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;*
- *pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;*
- *pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;*
- *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan; dan*
- *pelaksanaan fungsi lain di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan yang diserahkan oleh Sekretaris DPRD.*

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahi :

- **Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;**
- **Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;**
- **Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

*Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran* mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang fasilitasi penganggaran serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. *Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan* mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang fasilitasi pengawasan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. *Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi* mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang kerjasama dan aspirasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **d. Kelompok Jabatan Fungsional**

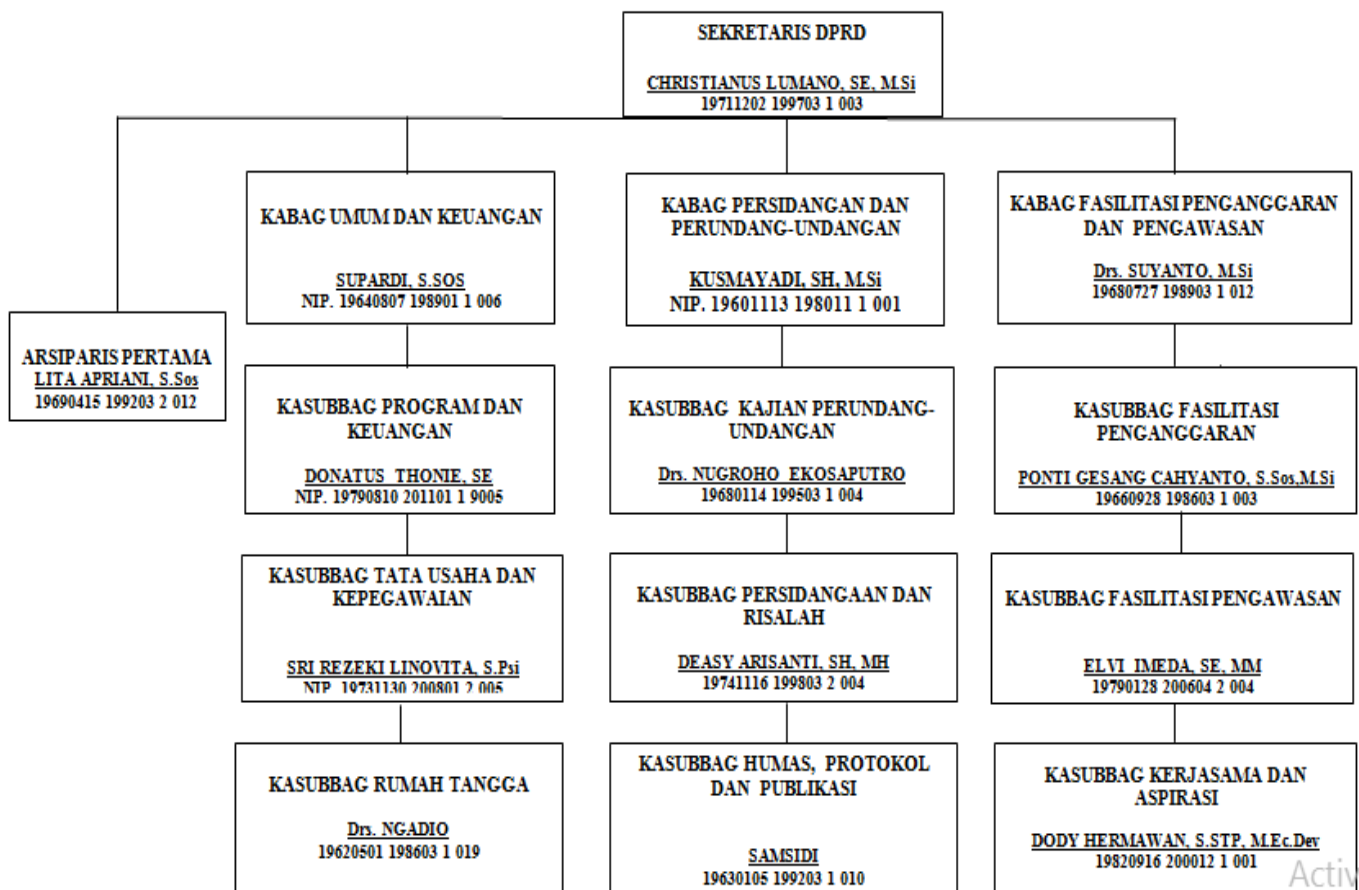
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan. Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan ketrampilan tertentu.

#### **e. Tenaga Ahli**

Adapun Tenaga Ahli disediakan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tenaga Ahli dimaksud ditunjuk dengan surat penugasan untuk waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.

Selanjutnya Struktur terlampir Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.**

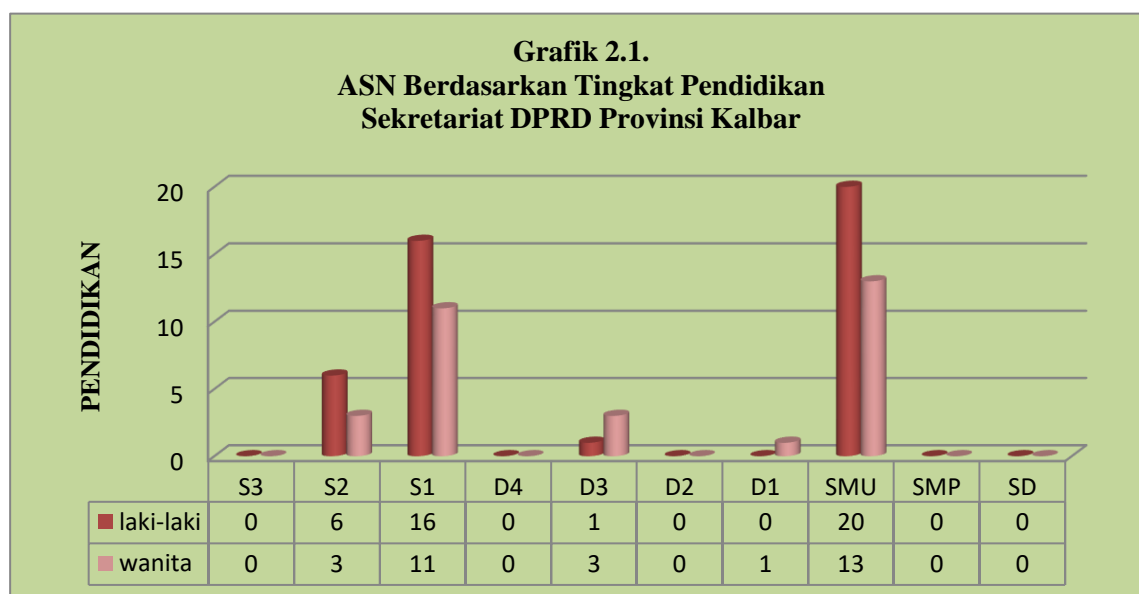
**Gambar 2.1.**  
**Struktur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018**



Activa  
Go to Di

## 2.2. Sumber Daya OPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar didukung oleh 75 (tujuh puluh lima) orang personil/PNS, yang terdiri dari 44 orang PNS laki-laki dan 31 PNS perempuan, Berdasarkan data kepegawaian periode sampai dengan Oktober 2018, Sumber Daya Aparatur (SDA) tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan Tingkat Pendidikan yang secara terperinci tertuang dalam grafik 2.1.



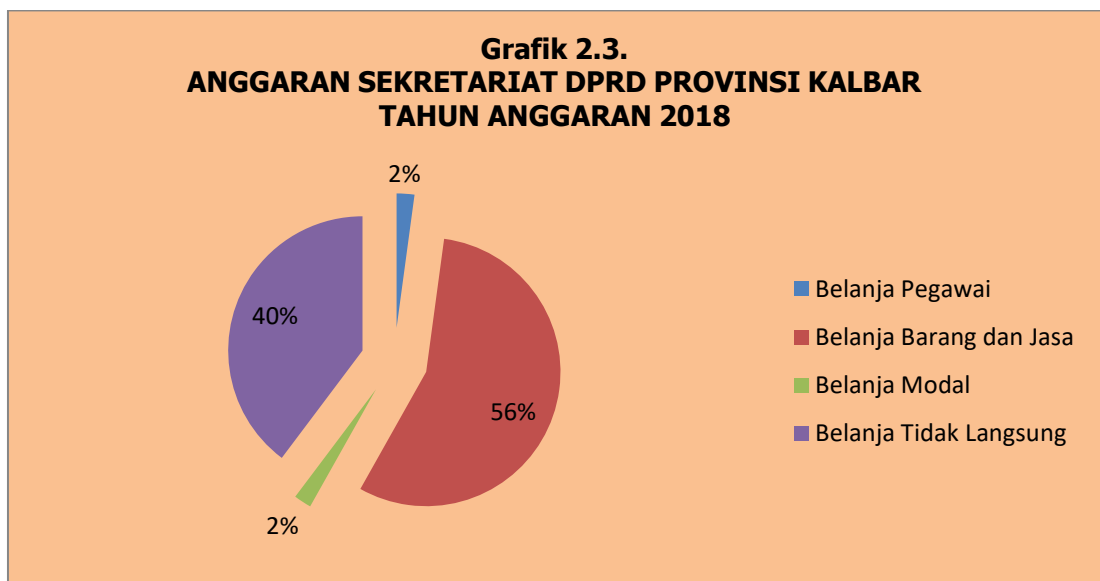
Sumber Data : DUK Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar, Oktober 2018

Bila dilihat dari jenjang golongan/Ruang Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat pada grafik 2.2.

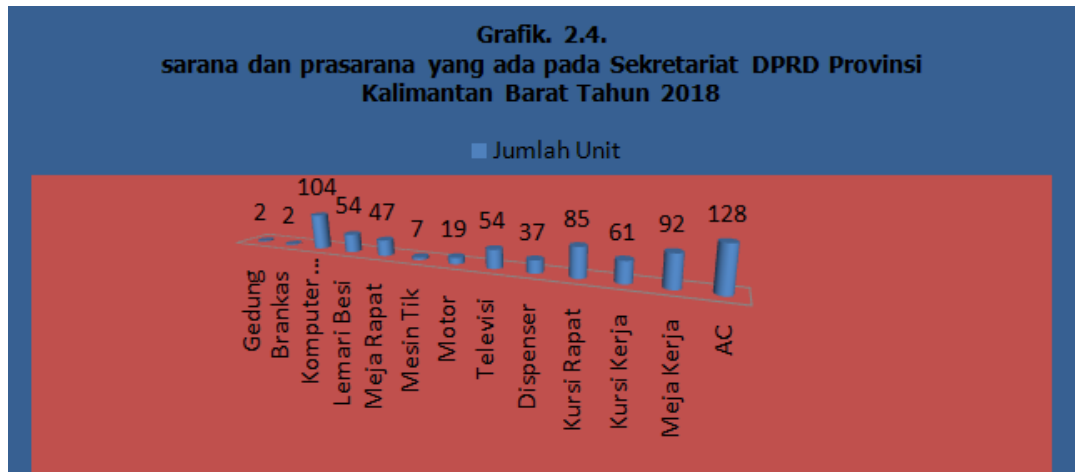


Sumber Data : DUK Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar, Oktober 2018

Dukungan keuangan/anggaran belanja yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat guna membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2018, dapat dilihat pada grafik 2.3.



Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dukungan sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana pada grafik 2.4.



Sumber Data : KIB Sekreatriat DPRD Provinsi Kalbar.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 s/d 2018) dapat terlihat pada **Tabel 2.1**, dimana **Tingkat Kemajuan pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebesar 95,00%**, sedangkan Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 s/d 2018) dapat terlihat pada **Tabel 2.2**, dimana **Tingkat Kemajuan Realisasi Capaian Target Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 s.d. 2018 sebesar 80%**.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Tingkat Kemajuan 2013 s/d 2018 (%)
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Fasilitasi reses	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah kunker dalam daerah yang difasilitasi : a. On the spot b. Monitoring c. Undangan dalam daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah kunker ke luar daerah yang difasilitasi : a. Konsultasi BANMUS b. Konsultasi BK c. Konsultasi BAPPERDA d. Konsultasi BANGAR e. Konsultasi KOMISI f. Konsultasi PANSUS g. Undangan luar daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Tingkat Kemajuan 2013 s/d 2018 (%)
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota yang difasilitasi : a. Studi banding BANMUS b. Studi banding BK c. Studi banding BAPPERDA d. Studi banding BANGAR e. Studi banding Komisi f. Studi banding PANSUS RAPERDA/Non	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	PSDM Anggota DPRD Provinsi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah rapat-rapat Komisi dan Fraksi yang difasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah rapat BANMUS yang difasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah rapat Paripurna yang difasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah kegiatan Pimpinan yang difasilitasi Keprotokolan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pengucapan sumpah/ janji (PAW)	-	-	-	0%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	0%	100%	50%	50%	50%	0%	50%
<b>PENCAPAIN KINERJA PELAYANAN SEKRETRIAT DPRD TAHUN 2013 S.D 2018</b>																				<b>95%</b>

**Tabel. 2.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat**



**Tahun 2013 s.d. 2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Tingkat Kemajuan 2013 s.d 2018 (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>7.583.355.000</b>	<b>8.363.545.000</b>	<b>6.690.788.500</b>	<b>7.380.682.900</b>	<b>8.876.539.106</b>	<b>7.403.411.069</b>	<b>7.417.489.852</b>	<b>5.924.489.556</b>	<b>6.938.805.643</b>	<b>7.790.803.795</b>	<b>98%</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>	<b>94%</b>	<b>88%</b>	<b>91%</b>
- Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	191.530	463.000	438.000	-	312.000	10%	23%	22%	0%	16%	14%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	720.840.000	726.600.000	804.600.000	1.228.800.000	1.518.600.000	607.490.837	513.868.741	642.657.153	974.657.633	870.444.564	84%	71%	80%	79%	57%	74%
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	150.000.000	150.050.000	102.400.000		102.650.000	149.000.000	149.989.200	102.099.700		28.033.100	99%	100%	100%	0%	27%	65%
- Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	50.000.000	47.400.000	48.912.000	48.600.000	48.600.000	26.524.600	33.139.600	26.873.800	23.825.800	36.774.000	53%	70%	55%	49%	76%	61%
- Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.530.000	5.000.000	300.000	1.318.500	1.422.000	3.153.000	2.859.000	10%	44%	47%	70%	57%	46%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	567.050.000	901.350.000	553.800.000	616.800.000	616.800.000	560.848.900	888.097.000	536.680.000	571.388.800	597.155.300	99%	99%	97%	93%	97%	97%
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	-	-	258.330.000		-	-	-	258.330.000		0%	0%	0%	100%	0%	20%
- Penyediaan alat tulis kantor	178.920.000	143.465.000	128.957.000	291.275.000	220.630.000	171.865.198	142.875.700	117.152.500	291.275.000	218.832.500	96%	100%	91%	100%	99%	97%
<b>Uraian</b>	<b>Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)</b>					<b>Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)</b>					<b>Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)</b>					<b>Tingkat Kemajuan 2013 s.d 2018 (%)</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
-	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	549.550.000	402.800.000	280.950.000		297.725.000	538.444.504	267.305.200	221.106.500		229.744.000	98%	66%	79%	0%	77%	64%
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	84.900.000	70.530.000	125.000.000	74.210.000	100.000.000	84.900.000	67.795.000	124.848.200	74.124.500	99.084.900	100%	96%	100%	100%	99%	99%
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	59.175.000	138.925.000	105.100.000	145.800.000	224.774.000	58.811.000	137.962.000	103.660.000	140.840.000	212.550.500	99%	99%	99%	97%	95%	98%
-	Penyediaan perlengkapan/ peralatan rumah tangga	22.740.000	61.790.000	98.570.000	51.191.000	67.283.000	21.630.000	44.280.000	95.707.000	51.116.000	63.681.500	95%	72%	97%	100%	95%	92%
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	147.375.000	156.000.000	149.575.000	100.000.000	109.740.000	147.375.000	134.830.000	149.488.000	99.410.000	101.085.000	100%	86%	100%	99%	92%	96%
-	Penyediaan makanan dan minuman	1.463.150.000	1.446.200.000	1.373.102.500	1.643.530.000	1.586.430.000	1.456.034.500	1.180.552.840	1.288.668.500	1.588.748.500	1.467.172.500	100%	82%	94%	97%	92%	93%
-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	2.074.000.000	2.195.648.000	829.357.680	909.841.252	1.034.851.796	2.074.000.000	2.099.818.570	534.370.800	887.929.510	959.733.080	100%	96%	64%	98%	93%	90%
-	Penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor/ rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	754.920.000	923.400.000	1.090.552.320	1.217.754.648	1.353.784.310	750.260.000	919.125.000	1.082.770.000	1.205.631.900	1.340.565.600	99%	100%	99%	99%	99%	99%
-	Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	102.000.000	110.400.000	138.000.000	139.200.000	147.600.000	102.000.000	82.500.000	123.600.000	124.800.000	144.000.000	100%	75%	90%	90%	98%	90%
-	Penyediaan jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi	653.735.000	832.170.000	584.470.000	380.070.000	1.153.320.000	653.735.000	702.252.501	502.309.403	376.440.000	1.140.002.851	100%	84%	86%	99%	99%	94%
-	Penataan dan pemeliharaan Arsip	-	51.817.000	63.542.000	59.851.000	59.851.000	-	51.317.000	62.792.000	58.845.000	58.901.000	0%	99%	99%	98%	98%	79%
-	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	-	-	208.900.000	208.900.000	208.900.000	-	-	207.846.000	208.290.000	201.872.400	0%	0%	99%	100%	97%	59%
Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Tingkat Kemajuan 2013 s.d 2018 (%)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

-	Penyediaan Jasa Sewa Rumah/Gedung Kantor/Bangunan Khusus	-	-	-	-	18.000.00 0	-	-	-	-	18.000.00 0	0%	0%	0%	0%	100%	20%
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>5.870.65 5.000</b>	<b>6.242.68 0.000</b>	<b>6.362.6 39.100</b>	<b>2.707.05 0.000</b>	<b>6.304.57 4.894</b>	<b>5.682.27 6.746</b>	<b>6.074.14 2.500</b>	<b>5.983.36 4.000</b>	<b>2.495.48 0.675</b>	<b>5.408.84 7.450</b>	97%	97%	94%	92%	86%	93%
-	Pembangunan Gedung Kantor	669.550.0 00	-	47.850. 000	-	-	666.247.3 75	-	47.525.00 0	-	-	100%	0%	99%	0%	0%	40%
-	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas /Operasional	-	61.550.00 0	-	196.150.0 00	-	-	52.679.90 0	-	195.650.0 00	-	0%	86%	0%	100%	0%	37%
-	Pengadaan Perlengkapan/ peralatan rumah jabatan/dinas	94.950.00 0	115.300.0 00	116.02 5.000	597.350.0 00	162.750.0 00	93.509.70 0	113.049.9 00	114.292.0 00	591.020.4 00	155.800.0 00	98%	98%	99%	99%	96%	98%
-	Pengadaan AC/ Kipas Angin	246.550.0 00	91.950.00 0	249.80 0.000	-	232.698.0 00	245.020.0 00	88.200.00 0	42.947.00 0	-	231.157.3 00	99%	96%	17%	0%	99%	62%
-	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	422.325.0 00	337.484.0 00	218.65 0.000	240.650.0 00	608.695.4 94	416.900.8 00	334.340.5 00	217.265.0 00	236.682.1 25	526.327.0 00	99%	99%	99%	98%	86%	96%
-	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga	245.700.0 00	60.600.00 0	191.15 0.000	-	121.400.0 00	234.386.0 00	59.210.00 0	189.710.0 00	-	116.450.0 00	95%	98%	99%	0%	96%	78%
-	Pengadaan Peningkatan Instalasi Listrik	-	-	189.30 0.000	-	-	-	-	185.250.0 00	-	-	0%	0%	98%	0%	0%	20%
-	Pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	515.600.0 00	21.100.00 0	243.55 0.000	-	389.800.0 00	510.979.0 00	19.635.10 0	241.470.0 00	-	361.946.0 00	99%	93%	99%	0%	93%	77%
-	Pengadaan sarana dan prasarana Sistem Informasi	-	-	191.15 0.000	-	60.650.00 0	-	-	190.848.0 00	-	60.076.40 0	0%	0%	100%	0%	99%	40%
-	Pengadaan sarana/ prasarana pendukung gedung kantor	127.050.0 00	-	261.05 0.000	-	-	125.490.0 00	-	258.325.5 00	-	-	99%	0%	99%	0%	0%	40%
-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	402.550.0 00	-	15.000. 000	-	18.000.00 0	398.344.2 00	-	14.475.00 0	-	17.750.00 0	99%	0%	97%	0%	99%	59%
Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Tingkat Kemajuan 2013 s.d 2018 (%)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

-	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, rumah dinas, mess, asrama	-	100.350.000	-	-	-	-	97.805.000	-	-	-	0%	97%	0%	0%	0%	19%
-	Pemeliharaan taman/ halaman kantor/ halaman rumah jabatan	-	-	244.800.000	65.650.000	246.300.000	-	-	243.237.800	65.165.000	245.973.400	0%	0%	99%	99%	100%	60%
-	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/ operasional	819.350.000	1.301.940.000	813.600.000	920.800.000	1.264.400.000	817.187.396	1.226.070.000	728.631.400	723.519.600	1.069.230.750	100%	94%	90%	79%	85%	89%
-	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah dinas/ jabatan	-	-	1.052.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
-	Pemeliharaan rutin/berkala AC / kipas angin	80.000.000	102.000.000	108.000.000	83.700.000	104.576.000	69.865.000	101.535.000	107.822.000	83.085.000	104.120.000	87%	100%	100%	99%	100%	97%
-	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	149.680.000	65.400.000	95.000.000	58.200.000	124.500.000	136.830.375	62.943.000	90.800.100	58.080.000	111.274.800	91%	96%	96%	100%	89%	94%
-	Pemeliharaan sarana dan prasarana studio, komunikasi dan sistem informasi	70.300.000	70.900.000	97.000.000	15.000.000	79.000.000	50.254.000	70.792.500	96.708.000	14.978.000	41.178.000	71%	100%	100%	100%	52%	85%
-	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	-	-	-	-	114.230.000	-	-	-	-	113.956.500	0%	0%	0%	0%	100%	20%
-	Pengadaan Meubelair	1.000.000.000	1.177.300.000	69.150.000	-	265.300.000	925.667.500	1.163.500.000	68.750.000	-	219.760.000	93%	99%	99%	0%	83%	75%
-	Pengadaan Generator	-	-	-	-	452.550.000	-	-	-	-	39.685.800	0%	0%	0%	0%	9%	2%
-	Pengadaan Jaringan Air	22.350.000	-	-	-	-	22.210.000	-	-	-	-	99%	0%	0%	0%	0%	20%
	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Tingkat Kemajuan 2013 s.d 2018 (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
-	Pengadaan sarana / prasarana olahraga	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%

-	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air	28.000.00 0	28.000.00 0	15.000. 000	-	62.000.00 0	27.884.00 0	17.237.00 0	12.085.50 0	-	56.325.00 0	100%	62%	81%	0%	91%	67%
-	Pemeliharaan instalasi listrik/ telepon	105.050.0 00	50.000.00 0	-	-	-	102.580.9 00	49.693.60 0	-	-	-	98%	99%	0%	0%	0%	39%
-	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair		50.000.00 0	-	-	-	-	49.520.00 0	-	-	-	0%	99%	0%	0%	0%	20%
-	Pemeliharaan rutin/berkala generator	82.000.00 0	96.750.00 0	110.50 0.000	106.300.0 00	137.400.0 00	69.792.50 0	84.885.00 0	109.067.2 00	105.475.5 50	107.670.0 00	85%	88%	99%	99%	78%	90%
-	Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	9.000.000	9.000.000	24.000. 000	12.000.00 0	24.000.00 0	9.000.000	6.865.000	15.161.50 0	11.895.00 0	23.635.00 0	100%	76%	63%	99%	98%	87%
-	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/ peralatan rumah tangga	6.000.000	6.500.000	6.500.0 00	-	8.500.000	6.000.000	1.220.000	-	-	-	100%	19%	0%	0%	0%	24%
-	Rehabilitasi rumah jabatan	313.950.0 00	-	203.43 0.000	218.950.0 00	50.650.00 0	310.299.0 00	-	200.400.0 00	218.055.0 00	49.750.00 0	99%	0%	99%	100%	98%	79%
-	Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	225.900.0 00	1.594.200 .000	1.959.3 70.000	91.150.00 0	-	221.720.0 00	1.574.611 .000	1.925.861 .000	90.915.00 0	-	98%	99%	98%	100%	0%	79%
-	Rehabilitasi peningkatan gedung kantor	-	-	-	-	1.079.437 .000	-	-	-	-	1.061.711 .000	0%	0%	0%	0%	98%	20%
-	Rehabilitasi/Peningkatan Pagar Kantor	-	-	191.05 0.000	-	221.650.0 00	-	-	189.576.0 00	-	221.211.0 00	0%	0%	99%	0%	100%	40%
-	Rehabilitasi/Peningkatan Plank Nama Kantor	-	-	35.500. 000	-	25.000.00 0	-	-	34.200.00 0	-	24.800.00 0	0%	0%	96%	0%	99%	39%
-	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air	-	-	-	-	225.550.0 00	-	-	-	-	224.794.5 00	0%	0%	0%	0%	100%	20%
Uraian		Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Tingkat Kemajuan 2013 s.d 2018 (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Air	-	-	-	101.150.0 00	225.538.4 00	-	-	-	100.960.0 00	224.265.0 00	0%	0%	0%	0%	99%	20%

-	Peningkatan jalan/ jembatan lingkungan kantor/ rumah jabatan	223.800.0 00	-	-	-	-	222.109.0 00	-	-	-	-	99%	0%	0%	0%	0%	20%
-	Pemeliharaan Peralatan / Perengkapan Khusus	-	902.356.0 00	-	-	-	-	900.350.0 00	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	20%
-	Pembuatan Emblem Emas Anggota DPRD	-	-	665.16 2.100	-	-	-	-	658.956.0 00	-	-	0%	0%	99%	0%	0%	20%
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>744.020. 000</b>	<b>982.685. 000</b>	<b>576.25 0.000</b>	<b>1.128.00 0.000</b>	<b>1.094.83 0.000</b>	<b>741.355. 000</b>	<b>867.688. 000</b>	<b>539.125. 000</b>	<b>1.066.73 8.495</b>	<b>1.087.18 8.500</b>	100%	88%	94%	95%	99%	95%
-	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	585.300.0 00	894.050.0 00	575.05 0.000	1.128.000 .000	843.450.0 00	583.116.0 00	785.758.0 00	539.125.0 00	1.066.738 .495	837.759.5 00	100%	88%	94%	95%	99%	95%
-	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	158.720.0 00	79.550.00 0	-	-	237.700.0 00	158.239.0 00	72.960.00 0	-	-	236.469.0 00	100%	92%	0%	0%	99%	58%
-	Pengadaan Kartu Tanda Pengenali Pegawai	-	9.085.000	1.200.0 00	-	13.680.00 0	-	8.970.000	-	-	12.960.00 0	0%	99%	0%	0%	95%	39%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>388.198. 500</b>	<b>546.875. 000</b>	<b>872.58 9.736</b>	<b>520.994. 000</b>	<b>754.316. 000</b>	<b>265.517. 500</b>	<b>340.342. 500</b>	<b>582.481. 888</b>	<b>419.531. 400</b>	<b>704.200. 342</b>	68%	62%	67%	81%	93%	74%
-	Pendidikan dan Pelatihan	75.751.00 0	117.691.0 00	107.80 8.000	25.000.00 0	50.000.00 0	32.970.00 0	-	11.770.00 0	5.100.000	49.050.00 0	44%	0%	11%	20%	98%	35%
-	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	221.340.0 00	308.800.0 00	294.49 9.736	150.000.0 00	300.000.0 00	170.640.0 00	235.548.5 00	192.320.0 88	125.895.9 00	284.936.7 42	77%	76%	65%	84%	95%	80%
-	Pembinaan jasmani dan rohani pegawai	62.550.00 0	55.800.00 0	241.94 1.000	236.341.0 00	294.366.0 00	34.750.00 0	40.610.00 0	175.551.0 00	212.688.0 00	260.263.6 00	56%	73%	73%	90%	88%	76%
-	Penyusunan Penetapan Kinerja	-	16.138.00 0	16.170. 000	20.000.00 0	31.400.00 0	-	15.738.00 0	14.415.00 0	19.989.50 0	31.400.00 0	0%	98%	89%	100%	100%	77%
Uraian		Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Tingkat Kemajuan 2013 s.d 2018 (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	Penyusunan Standar Operasional	17.675.00 0	-	64.320. 000	-	30.260.00 0	16.475.00 0	-	50.214.40 0	-	30.260.00 0	93%	0%	78%	0%	100%	54%

-	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	97.546.000	24.145.000	48.290.000	-	-	87.906.400	-	48.290.000	0%	0%	90%	0%	100%	<b>38%</b>
-	Analisis Jabatan	10.882.500	-	-	-	-	10.682.500	-	-	-	-	98%	0%	0%	0%	0%	<b>20%</b>
-	Pengelolaan Dokumen Data Kepegawaian	-	48.446.000	50.305.000	65.508.000	-	-	48.446.000	50.305.000	55.858.000	-	0%	100%	100%	85%	0%	<b>57%</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>125.216.500</b>	<b>150.842.500</b>	<b>166.140.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>292.910.800</b>	<b>114.507.000</b>	<b>142.412.500</b>	<b>154.915.000</b>	<b>158.339.000</b>	<b>281.735.100</b>	91%	94%	93%	99%	96%	<b>95%</b>
-	Penyusunan Laporan keuangan	13.900.000	34.240.000	34.240.000	35.000.000	35.000.000	12.970.000	31.980.000	32.735.000	33.450.000	33.950.000	93%	93%	96%	96%	97%	<b>95%</b>
-	Penyusunan LAKIP	12.891.500	16.331.500	19.800.000	20.000.000	33.080.000	12.132.000	15.931.500	17.100.000	19.996.000	32.980.000	94%	98%	86%	100%	100%	<b>96%</b>
-	Penyusunan RENJA	9.779.250	13.573.000	20.790.000	20.000.000	33.752.000	9.695.000	13.253.000	17.280.000	19.998.000	33.702.000	99%	98%	83%	100%	100%	<b>96%</b>
-	Penyusunan dan pelaporan LPPD dan LKPJ	11.122.500	29.286.500	29.280.000	25.000.000	63.580.000	10.963.000	23.836.500	25.770.000	25.000.000	63.580.000	99%	81%	88%	100%	100%	<b>94%</b>
-	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	24.040.000	28.479.500	-	-	48.642.800	23.374.000	28.479.500	-	-	47.495.100	97%	100%	0%	0%	98%	<b>59%</b>
-	Penyusunan RENSTRA	31.295.000	-	-	-	-	23.962.500	-	-	-	-	77%	0%	0%	0%	0%	<b>15%</b>
-	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	22.188.250	28.932.000	28.930.000	30.000.000	33.944.000	21.410.500	28.932.000	28.930.000	29.895.000	29.744.000	96%	100%	100%	100%	88%	<b>97%</b>
-	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	-	-	33.100.000	30.000.000	44.912.000	-	-	33.100.000	30.000.000	40.284.000	0%	0%	100%	100%	90%	<b>58%</b>
Uraian		Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Tingkat Kemajuan 2013 s.d 2018 (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>		<b>358.105.000</b>	-	-	-	<b>25.000.000</b>	-	-	-	-	<b>22.325.000</b>	0%	0%	0%	0%	89%	<b>18%</b>

-	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	358.105.00	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	22.325.000	0%	0%	0%	0%	89%	18%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>		<b>22.280.175.500</b>	<b>17.699.455.000</b>	<b>34.944.289.109</b>	<b>37.375.566.000</b>	<b>43.240.846.000</b>	<b>15.505.113.126</b>	<b>11.014.978.429</b>	<b>24.874.254.899</b>	<b>30.056.140.637</b>	<b>35.779.974.637</b>	70%	62%	71%	80%	83%	73%
-	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama	60.857.500	35.247.500	34.192.500	5.521.000	5.521.000	26.813.500	35.112.500	33.276.000	4.306.000	-	44%	100%	97%	78%	0%	64%
-	Kegiatan reses	6.106.650.000	4.539.250.000	11.220.700.000	11.532.150.000	11.676.450.000	5.533.182.550	4.032.915.570	10.271.198.590	10.726.146.900	11.119.935.150	91%	89%	92%	93%	95%	92%
-	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam dan luar daerah	10.898.318.000	7.467.930.000	13.712.788.109	13.265.000.000	14.536.695.000	6.922.732.680	3.645.425.167	7.939.839.866	10.370.638.527	12.400.713.697	64%	49%	58%	78%	85%	67%
-	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	5.214.350.000	5.609.600.000	9.941.315.500	8.432.640.000	11.756.287.000	3.022.384.396	3.254.217.192	6.594.682.443	6.361.765.854	8.000.216.852	58%	58%	66%	75%	68%	65%
-	Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat / Demo / Unjukrasa	-	47.427.500	35.293.000	66.765.000	66.765.000	-	47.308.000	35.258.000	65.820.000	63.335.000	0%	100%	100%	99%	95%	79%
-	Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Anggota DPRD Provinsi kalbar	-	-	-	4.073.490.000	5.199.128.000	-	-	-	2.527.463.356	4.195.773.938	0%	0%	0%	62%	81%	29%
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN</b>		<b>2.176.794.500</b>	<b>2.957.045.500</b>	<b>5.909.459.500</b>	<b>4.935.868.000</b>	<b>8.197.332.200</b>	<b>1.913.355.100</b>	<b>1.903.634.600</b>	<b>4.522.333.797</b>	<b>4.053.200.924</b>	<b>6.718.133.575</b>	88%	64%	77%	82%	82%	79%
-	Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan, Keputusan DPRD dan Sekretaris DPRD	73.125.000	100.755.000	114.105.000	147.015.000	147.015.000	71.313.750	100.509.000	105.327.000	92.257.000	134.419.000	98%	100%	92%	63%	91%	89%
Uraian		Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Tingkat Kemajuan 2013 s.d 2018 (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	Penyusunan PERDA dan Non PERDA	602.625.000	755.695.000	768.530.000	711.425.000	1.012.456.000	451.062.600	417.325.000	569.582.200	459.680.600	789.314.447	75%	55%	74%	65%	78%	69%



-	Fasilitasi Penyusunan Risalah rapat paripurna dan hasil-hasil rapat DPRD	135.875.000	234.527.500	318.495.000	338.580.000	521.760.000	134.630.000	174.301.100	251.700.000	322.530.000	458.037.000	99%	74%	79%	95%	88%	87%
-	Fasilitasi Penyusunan Memori Kegiatan DPRD Prov. Kalbar masa jabatan 2009 - 2014	-	60.000.000	-	-	-	-	34.029.000	-	-	-	0%	57%	0%	0%	0%	11%
-	Fasilitasi Penyusunan Buku Profil Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Kalbar masa jabatan 2009 - 2014	-	109.166.000	-	-	-	-	104.166.000	-	-	-	0%	95%	0%	0%	0%	19%
-	Penerbitan buletin legislatif (rumah rakyat)	231.840.000	141.540.000	117.540.000	-	89.590.000	149.998.000	133.790.000	115.177.500	-	69.895.000	65%	95%	98%	0%	78%	67%
-	Evaluasi Jabatan	-	-	24.341.000	-	24.341.000	-	-	24.116.000	-	24.341.000	0%	0%	99%	0%	100%	40%
-	Pemutakhiran Data	13.244.500	33.597.000	81.483.000	62.335.000	64.935.000	13.244.500	33.097.000	70.758.772	62.335.000	59.300.000	100%	99%	87%	100%	91%	95%
-	Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian	-	-	-	-	67.008.000	-	-	-	-	57.900.000	0%	0%	0%	0%	86%	17%
-	Pengolahan data sistem informasi	67.580.000	54.990.000	25.620.000	1.197.000	3.997.000	56.740.000	54.714.000	25.620.000	1.122.000	-	84%	99%	100%	94%	0%	75%
-	Fasilitasi Rapat Banmus dan Alat Kelengkapan Lainnya	-	-	127.760.000	103.159.000	120.620.000	-	-	114.660.000	91.759.000	118.136.100	0%	0%	90%	89%	98%	55%
-	Kliping Koran Kegiatan Anggota DPRD Prov. Kalbar	-	-	38.540.000	30.000.000	44.340.000	-	-	38.161.250	29.760.000	44.340.000	0%	0%	99%	99%	100%	60%
-	Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Kalbar	-	-	3.032.960.000	2.862.682.000	4.668.693.000	-	-	2.078.916.260	2.814.846.324	3.975.251.630	0%	0%	69%	98%	85%	50%
	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)</b>					<b>Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)</b>					<b>Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)</b>					<b>Tingkat Kemajuan 2013 s.d 2018 (%)</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	
-	Fasilitasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Prov. Kalbar Masa Jabatan 2014 - 2019	-	-	-	79.900.000	133.140.000	-	-	-	79.900.000	-	0%	0%	0%	100%	0%	20%

-	Pemeliharaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas	-	100.400.00	-	50.650.00	50.650.00	-	95.400.00	50.150.00	50.150.00	0%	95%	0%	99%	99%	59%	
-	Penyediaan Jasa Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-	-	90.115.00	-	-	-	74.134.708	0%	0%	0%	0%	82%	16%	
-	Sarana dan Prasarana Media Center	-	-	-	-	100.000.00	-	-	-	92.831.000	0%	0%	0%	0%	93%	19%	
-	Fasilitasi Rapat Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Prov. Kalbar	-	-	-	-	123.634.500	-	-	-	104.626.000	0%	0%	0%	0%	85%	17%	
-	Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. Kalbar	-	-	-	49.111.000	-	-	-	48.861.000	-	0%	0%	0%	99%	0%	20%	
-	Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. Kalbar	-	-	-	-	64.098.000	-	-	-	64.098.000	0%	0%	0%	0%	100%	20%	
-	Fasilitasi Forum Sekwan Regional Kalimantan	-	-	-	-	118.991.400	-	-	-	96.487.090	0%	0%	0%	0%	81%	16%	
-	Fasilitasi Penyusunan PERGUB tentang Pelaksanaan Kedudukan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-	-	360.461.200	-	-	-	190.280.800	0%	0%	0%	0%	53%	11%	
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Fungsi Kedewanan	-	-	-	-	146.455.600	-	-	-	112.764.300	0%	0%	0%	0%	77%	15%	
-	Pengambilan Sumpah Janji PNS	-	-	9.679.000	-	-	-	9.679.000	-	-	0%	0%	100%	0%	0%	20%	
	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)</b>					<b>Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Juta Rp.)</b>					<b>Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)</b>					<b>Tingkat Kemajuan 2013 s.d 2018 (%)</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
-	Pendidikan dan Pelatihan Satpam	-	-	49.375.000	-	-	-	-	49.375.000	-	-	0%	0%	100%	0%	0%	20%
-	Seleksi Tenaga Pendukung Perkantoran	-	-	9.010.000	-	-	-	-	8.160.000	-	-	0%	0%	91%	0%	0%	18%

				00													
-	Appraisal Nilai Sewa Perumahan	-	-	153.05 0.000	-	-	-	-	110.000.0 00	-		0%	0%	72%	0%	0%	14%
-	Fasilitasi Acara Resmi (Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan) dan Keprotokolan Lainnya	-	-	460.65 5.500	-	-	-	-	453.645.8 15	-		0%	0%	98%	0%	0%	20%
-	Pembuatan Naskah Kajian Akademik dan raperda Inisiatif DPRD	-	-	231.67 1.000	499.814.0 00	162.464.0 00	-	-	202.170.0 00	-	126.260.0 00	0%	0%	87%	0%	78%	33%
-	Persiapan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	358.105.0 00	-	-	-	-	357.636.2 50	-	-	-		100%	0%	0%	0%	0%	20%
-	Fasilitasi Rapat-Rapat Fraksi DPRD Prov. Kalbar	-	-	119.30 0.000	-	-	-	-	119.090.0 00	-		0%	0%	100%	0%	0%	20%
-	Fasilitasi Rapat-Rapat Komisi DPRD Prov. Kalbar	-	45.950.00 0	126.69 5.000	-	82.567.50 0	-	45.950.00 0	126.695.0 00	-	75.567.50 0	0%	100%	100%	0%	92%	58%
-	Pelantikan Anggota DPRD Prov. Kalbar	-	451.875.0 00	-	-	-	-	356.997.5 00	-	-		0%	79%	0%	0%	0%	16%
-	Fasilitasi Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Prov. Kalimantan Barat	-	411.000.0 00	-	-	-	-	232.906.0 00	-	-		0%	57%	0%	0%	0%	11%
-	Penyediaan jasa jaminan kesehatan	558.050.0 00	332.550.0 00	-	-	-	553.350.0 00	-	-	-		99%	0%	0%	0%	0%	20%
-	Pengadaan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah	136.350.0 00	125.000.0 00	100.65 0.000	-	-	125.380.0 00	120.450.0 00	49.500.00 0	-		92%	96%	49%	0%	0%	47%
	<b>TOTAL</b>	<b>39.526.52 0.000</b>	<b>36.943.12 8.000</b>	<b>55.522. 155.945</b>	<b>54.208.16 0.900</b>	<b>68.786.34 9.000</b>	<b>31.625.53 5.541</b>	<b>27.760.68 8.381</b>	<b>42.580.96 4.140</b>	<b>45.188.23 6.774</b>	<b>57.793.20 8.399</b>	<b>80%</b>	<b>75%</b>	<b>77%</b>	<b>83%</b>	<b>84%</b>	<b>80%</b>

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dalam melaksanakan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, terdapat beberapa tantangan atau ancaman, antara lain :

- a. Aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang;
- b. Belum lengkapnya peraturan yang terkait dengan pelayanan administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, terdapat beberapa peluang, antara lain :

- a. Permintaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dari anggota DPRD;
- b. Kondisi keamanan di daerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi berkembangnya pelaksanaan administrasi pemerintahan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar.

Konteks perumusan isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan tugas dan fungsinya, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu factor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*).

Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan factor-faktor kunci keberhasilan ini adalah Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Secara efektif Analisis SWOT dapat membantu menstrukturkan masalah dan menganalisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan Kekuatan (*Strengths*) dan Peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*).

#### **1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal**

- a. Identifikasi dan Analisa **Kekuatan** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 3.1.**  
**IDENTIFIKASI KEKUATAN**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No.	INDIKATOR	POTENSI %	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1.	Tersedianya sarana dan prasarana kerja serta dukungan penganggaran Kedewanan	35	4	1,40
2.	Adanya struktur kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	35	4	1,40
3.	Hubungan kerja yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD	30	3	0,90
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		<b>3,70</b>
Skor dinilai skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar				

- b. Identifikasi dan Analisa **Kelemahan** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 3.2.**  
**IDENTIFIKASI KELEMAHAN**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No.	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
		%		
1.	Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil pelayanan dan pendampingan Anggota DPRD	60	4	2,40
2.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan Pelayanan Kedewanan	40	3	1,20
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		<b>3,60</b>
Skor dinilai skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar				

## 2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eskternal

- a. Identifikasi dan Analisa **Peluang** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 3.3.**  
**IDENTIFIKASI PELUANG**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No.	INDIKATOR	POTENSI %	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1.	Terbentuknya jejaring kerja ( <i>networking</i> ) dengan Perguruan Tinggi, institusi Pemerintah, dan media massa	40	3	1,20
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik ( <i>good local governance</i> )	60	4	2,40
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		<b>3,60</b>
Skor dinilai skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar				

- b. Identifikasi dan Analisa **Ancaman** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 3.4.**  
**IDENTIFIKASI ANCAMAN**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

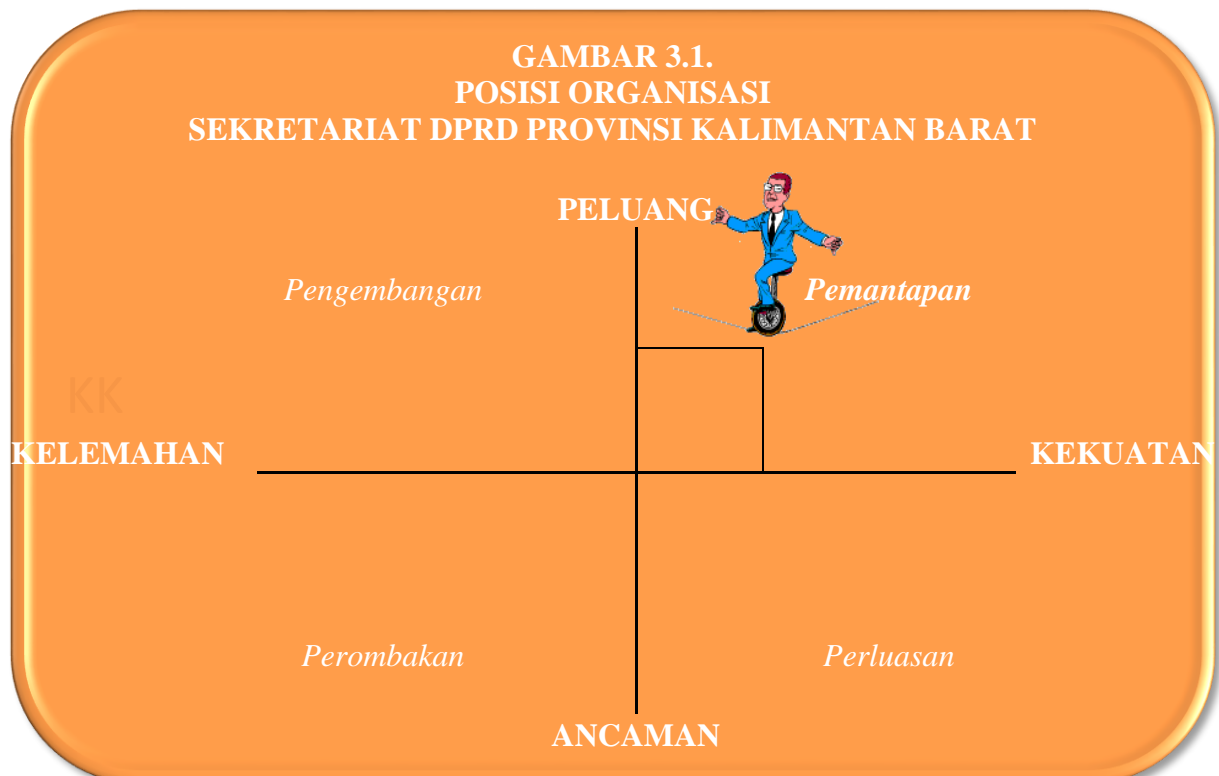
No.	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
		%		
1.	Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD	50	4	2,00
2.	Masih adanya opini terhadap OPD Sekreatriat DPRD sebagai organisasi yang inferior	50	4	2,00
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		<b>4,00</b>
Skor dinilai skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar				

Setelah mengidentifikasi skor baik dari Lingkungan Internal maupun Lingkungan Eksternal, selanjutnya dapat membuat matriks keseimbangan posisi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, seperti pada tabel 3.5 berikut ini.

**Tabel 3.5.**  
**MATRIKS POSISI**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

INDIKATOR	Skor Tertimbang	INDIKATOR	Skor Tertimbang
<b>Kekuatan</b>	3,70	Peluang	3,60
<b>Kelemahan</b>	3,60	Ancaman	4,00
<b>KESEIMBANGAN</b>	<b>0,10</b>	<b>KESEIMBANGAN</b>	<b>0,40</b>

Dari matriks sebagaimana tabel 3.5 di atas, dapat diilustrasikan posisi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada posisi menuju “*Pemantapan*” yang dapat diartikan bahwa Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam posisi pemantapan pelayanan, seperti pada gambar 3.1. berikut ini.





### 3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana termuat dalam PERDA Provinsi Kalbar Nomor 2 Tahun 2019, visi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yaitu: ***“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan”***.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk

mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan Masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Misi Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah Misi ke-2, yaitu : **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance”**.

Yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yang dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di Bagian Timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di Bagian Selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

### **3.3. Telaahan Rentsra K/L dan Renstra Perangkat Daerah**

#### **3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri**

Perencanaan strategis dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dirumuskan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 dengan menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
  - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Penguatan dan internalisasi ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
  - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
  - d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi :
  - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;

- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah dan toponimi;
  - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
  - e. Peningkatan efektifitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi :
- a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
  - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
  - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
  - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
  - g. Harmonisasi dan penataan Produk Hukum Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi :
- a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
  - b. Mendorong penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
  - c. Mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
  - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di daerah;
  - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;

- f. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
  - g. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi :
  - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan dan sinergisitas pembangunan daerah serta antara pusat dan daerah;
  - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi :
  - a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
  - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
  - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar dan 8 urusan pilihan;
  - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan.
7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi :
  - a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
  - b. Penguatan kelembagaan PTSP di daerah;
  - c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahay kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi :
  - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;

- d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
  - e. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa.
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi :
- a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Pemanfaatan NIK, *database* kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP-4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
  - d. Peningkatan kualitas aparatur dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi :**
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
  - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
  - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
  - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
  - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.

### 3.3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Program Kerja DPRD

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, adalah sebagai berikut :

- (1) DPRD provinsi dan kabupaten/kota menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Program kerja disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.
- (3) Program kerja disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.

- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
- (5) Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja dalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna.
- (7) Rapat dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
- (8) Program kerja DPRD menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.
- (9) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

**Tidak Ada**

#### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih maka harus mengetahui isu-isu strategis yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Upaya pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan memerlukan strategi yang tepat dengan memperhatikan lingkungan strategis yang didasarkan pada analisis kekuatan dan kelemahan dari sisi internal serta diselaraskan dengan peluang dan ancaman dari sisi eksternal.

Adapun kriteria penentuan isu-isu strategis yang digunakan untuk mencapai sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;

3. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani;
6. Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Setelah menentukan kriteria, tahap berikutnya Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat menentukan bobot di setiap masing-masing kriteria, dan mensinkronisasikan pada analisis kekuatan dan kelemahan dari sisi internal serta diselaraskan dengan peluang dan ancaman dari sisi eksternal, sehingga didapat isu-isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, seperti terlihat pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**RUMUSAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	ISU STRATEGIS	KRITERIA	KRITERIA	KRITERIA	KRITERIA	KRITERIA	KRITERIA	JMLH	RANKING
		1 (20%)	2 (10%)	3 (20%)	4 (10%)	5 (15%)	6 (25%)		
<b>KEKUATAN</b>									
1.	Tersedianya sarana dan prasarana kerja serta dukungan penganggaran Kedewanan	4 (0,8)	4 (0,4)	2 (0,4)	2 (0,2)	3 (0,45)	2 (0,5)	2,75	5
2.	Adanya struktur kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	4 (0,8)	4 (0,4)	2 (0,4)	2 (0,2)	4 (0,6)	4 (1)	3,40	4
3.	Hubungan kerja yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD	3 (0,6)	4 (0,4)	4 (0,8)	4 (0,4)	4 (0,6)	4 (1,00)	4,00	1
<b>KELEMAHAN</b>									
4.	Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil pelayanan dan pendampingan Anggota DPRD	4 (0,8)	4 (0,4)	4 (0,8)	3 (0,3)	4 (0,6)	4 (1,00)	3,90	2
5.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan	1 (0,2)	3 (0,3)	1 (0,2)	1 (0,1)	3 (0,45)	0	1,45	8



	Pelayanan Kedewanan								
<b>PELUANG</b>									
6.	Terbentuknya jejaring kerja ( <i>networking</i> ) dengan Perguruan Tinggi, institusi Pemerintah, dan media massa	2 (0,4)	2 (0,2)	4 (0,8)	2 (0,2)	4 (0,6)	0	2,20	6
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik ( <i>good local governance</i> )	4 (0,8)	0	1 (0,2)	3 (0,3)	2 (0,3)	2 (0,5)	2,10	7
<b>ANCAMAN</b>									
8.	Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD	4 (0,8)	4 (0,4)	4 (0,8)	3 (0,3)	4 (0,6)	4 (1,00)	3,90	2
9.	Masih adanya opini terhadap OPD Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior	4 (0,8)	4 (0,4)	4 (0,8)	4 (0,4)	4 (0,6)	3 (0,75)	3,75	3

Dari tabel 3.6 di atas, dapat terlihat urutan isu-isu strategis agar dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari :

1. **Hubungan kerja yang baik antar bagian dan unit kerja lainnya;**
2. **terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya;**
3. **masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD;**
4. **masih adanya opini terhadap OPD Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior;**
5. **adanya struktur kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

6. tersedianya sarana dan prasarana kerja serta dukungan penganggaran;
7. terbentuknya jejaring kerja (*networking*) dengan Perguruan Tinggi, institusi Pemerintah, dan media massa;
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*); dan
9. Belum optimalnya pemanfaatan IT.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017, *Tujuan* adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan *Sasaran* adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi pada urusan bidang Pelayanan Dasar Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dilekatkan pada misi Gubernur Nomor 2 (dua), yaitu “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance*”.

Selanjutnya, perumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 disusun dalam kerangka pencapaian misi ke-2 tersebut melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi Sekretariat DPRD serta fasilitasi terhadap pelayanan administrasi kedewanan.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu) sampai 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Adapun sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023 adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD.

Rincian terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
						2019	2020	2021	2022	2023
<b>Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance</b>										
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	A	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD	78	81	82	83	84	85

KETERANGAN (NILAI TARGET CAPAIAN SASARAN) :

SKOR	NILAI	INTERPRETASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI
> 85	AA	Memuaskan
> 75-85	A	Sangat Baik
> 65-75	B	Baik
> 50-65	CC	Cukup Baik
> 30-50	C	Agak Kurang
0-30	D	Kurang

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional.

Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi-misi-tujuan-sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan maupun petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan dapat berupa *regulatif* seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana, dan waktu. Adapun strategi yang ditetapkan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2018-2023, yaitu peningkatan kualitas penyelenggaraan perundang-undangan dan pelayanan DPRD. Sedangkan kebijakan yang ditetapkan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Meningkatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/ Keputusan DPRD; dan
- b. Meningkatkan fasilitasi pelayanan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi.

**Tabel 5.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**  
**RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**TAHUN 2018 - 2023**

<b>VISI</b>	:	<b>Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan</b>	
<b>MISI</b>	:	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance</b>	
<b>TUJUAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Meningkatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/ Keputusan DPRD  Meningkatkan dukungan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penentuan rencana program dan kegiatan prioritas serta kerangka pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun anggaran, merupakan *road map* atau tahapan target capaian berikut indikator kinerja yang akan menjadi dasar penilaian terhadap keberhasilan tingkat pencapaian program pertahunnya, sehingga dapat mencapai target kinerja yang sesuai dengan indikator sasaran pada akhir periode RENSTRA.

Berdasarkan hasil rumusan *Tujuan, Sasaran, Strategi* dan *Arah Kebijakan*, telah ditetapkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 pada Tabel 6.1, sebagai berikut :

**Tabel 6.1.Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023  
Provinsi Kalimantan Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			7.780.691.100		8.169.725.655		8.578.211.938		9.007.122.535		9.457.478.661		9.930.352.594	
		15	01	Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan dan Keputusan DPRD	Jumlah Naskah Keputusan Pimpinan dan Keputusan DPRD yang terakomodir	35 Naskah Keputusan Pimpinan, 55 Naskah Keputusan DPRD dan 75 Keputusan Sekwan	35 Naskah Keputusan Pimpinan, 55 Naskah Keputusan DPRD dan 75 Keputusan Sekwan	35 Naskah Keputusan Pimpinan, 55 Naskah Keputusan DPRD dan 75 Keputusan Sekwan	35 Naskah Keputusan Pimpinan, 55 Naskah Keputusan DPRD dan 75 Keputusan Sekwan	34 Keputusan	34 Keputusan	34 Keputusan	34 Keputusan	34 Keputusan	34 Keputusan	34 Keputusan	34 Keputusan	116.625.333
		15	02	Penyusunan PERDA	Jumlah PERDA yang terakomodir	8 PERDA	8 PERDA	1.457.083.000	12 Perda	1.529.937.150	12 Perda	1.606.434.008	13 Perda	1.686.755.708	13 Perda	1.771.093.493	13 Perda	1.859.648.168
		15	03	Pembuatan Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	Jumlah Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD yang terakomodir	4 Naskah	4 Raperda	325.284.000	4 Raperda	341.548.200	4 Raperda	358.625.610	4 Raperda	376.556.891	4 Raperda	395.384.735	4 Raperda	415.153.972
		15	04	Penyusunan Kajian terkait Implementasi Peraturan Pemerintah	Jumlah Kajian terkait Implementasi Peraturan Pemerintah	1 Kajian	1 Kajian	77.467.000	1 Kajian	81.340.350	1 Kajian	85.407.368	1 Kajian	89.677.736	1 Kajian	94.161.623	1 Kajian	98.869.704



		15	05	Pelayanan Administrasi BAPEMPERDA DPRD	Jumlah Laporan BAPEMPERDA DPRD	6 Laporan	6 Laporan	1.873.391.000	6 Laporan	1.967.060.550	6 Laporan	2.065.413.578	6 Laporan	2.168.684.256	6 Laporan	2.277.118.469	6 Laporan	2.390.974.393
		15	06	Pelayanan Administrasi Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Raperda APBD yang dihasilkan oleh Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Provinsi Kalbar	2 Raperda	2 Raperda	2.322.053.700	2 Raperda	2.438.156.385	2 Raperda	2.560.064.204	2 Raperda	2.688.067.414	2 Raperda	2.822.470.785	2 Raperda	2.963.594.324
		15	07	Pelayanan Administrasi Pertanggungjawaban/Perhitungan APBD	Jumlah Raperda APBD yang dihasilkan oleh Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Provinsi Kalbar	1 Raperda	1 Raperda	507.603.400	1 Raperda	532.983.570	1 Raperda	559.632.749	1 Raperda	587.614.386	1 Raperda	616.995.105	1 Raperda	647.844.860
		15	08	Sosialisasi Perda	Jumlah PERDA yang terakomodir	8 Perda	8 Perda	1.126.430.000	8 Perda	1.182.751.500	8 Perda	1.241.889.075	8 Perda	1.303.983.529	8 Perda	1.369.182.705	8 Perda	1.437.641.840
		16		Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan DPRD				53.426.676.800		56.098.010.640		58.902.911.172		61.848.056.731		71.930.115.083		75.526.620.837
		16	01	Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang difasilitasi	3 Kali	3 Kali	4.236.858.300	3 Kali	4.448.701.215	3 Kali	4.671.136.276	3 Kali	4.904.693.090	3 Kali	5.149.927.744	3 Kali	5.407.424.131

		16	02	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota dalam dan luar daerah	20 laporan	20 laporan	11.800.641.500	20 laporan	12.390.673.575	20 laporan	13.010.207.254	20 laporan	13.660.717.616	20 laporan	14.343.753.497	20 laporan	15.060.941.172
		16	03	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Laporan Pertemuan Asosiasi Dewan Seluruh Indonesia dan Kegiatan PANSUS	6 laporan	6 laporan	5.291.577.000	6 laporan	5.556.155.850	6 laporan	5.833.963.643	6 laporan	6.125.661.825	6 laporan	6.431.944.916	6 laporan	6.753.542.162
		16	04	Hearing/Dialo g dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Jumlah Hearing/Dialo g dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	3 Kali	3 Kali	67.811.000	3 Kali	71.201.550	3 Kali	74.761.628	3 Kali	78.499.709	3 Kali	82.424.694	3 Kali	86.545.929
		16	05	Reses ke masing-masing Daerah Pemilihan (DAPIL)	Jumlah Reses ke masing-masing DAPIL yang dilaksanakan	2 kali reses/ 8 titik	2 kali reses/ 8 titik	16.893.192.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	06	Penjaringan Aspirasi Masyarakat ke DAPIL masing-masing	Jumlah Reses ke masing-masing DAPIL yang dilaksanakan	-	-	-	3 kali reses/ 8 titik	26.250.500.000	3 kali reses/ 8 titik	27.563.025.000	3 kali reses/ 8 titik	28.941.176.250	3 kali reses/ 8 titik	30.388.235.063	3 kali reses/ 8 titik	31.907.646.816
		16	07	Penyampaian pengaduan dan aspirasi masyarakat / demo / unjuk rasa	Jumlah Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat/ Demo/Unjukr asa yang difasilitasi	13 Kali	14 Kali	149.888.000	14 Kali	157.382.400	14 Kali	165.251.520	14 Kali	173.514.096	14 Kali	182.189.801	14 Kali	191.299.291

		16	08	Penyusunan Data/Bahan Dukungan Aspirasi	Jumlah Dokumen Bahan/Dukungan Aspirasi	0	6 kali	149.888.000	6 kali	157.382.400	6 kali	165.251.520	6 kali	173.514.096	6 kali	182.189.801	6 kali	191.299.291
		16	09	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Fungsi-Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Fungsi-Fungsi Penganggaran dan Pengawasan yang dilaksanakan	1 kali/ 65 anggota	1 kali/ 65 anggota	104.000.000	1 kali/ 65 anggota	109.200.000	1 kali/ 65 anggota	114.660.000	1 kali/ 65 anggota	120.393.000	1 kali/ 65 anggota	126.412.650	1 kali/ 65 anggota	132.733.283
		16	10	Pansus LKPJ Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan oleh Pansus LKPJ Gubernur Kalbar	1 Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen Rekomendasi	514.106.000	1 Dokumen Rekomendasi	539.811.300	1 Dokumen Rekomendasi	566.801.865	1 Dokumen Rekomendasi	595.141.958	1 Dokumen Rekomendasi	624.899.056	1 Dokumen Rekomendasi	656.144.009
		16	11	Pelayanan Administrasi Pengawasan Komisi	Jumlah Rapat Kerja Komisi dengan mitra kerja masing-masing	10 kali	10 kali	7.107.823.000	10 kali	7.463.214.150	10 kali	7.836.374.858	10 kali	8.228.193.600	10 kali	8.639.603.280	10 kali	9.071.583.444
		16	12	Pelayanan Administrasi Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalbar	Tersedianya Administrasi Badan Kehormatan (BK) dan Kode Etik DPRD Provinsi Kalbar	7 Rapat	6 Rapat	776.029.000	6 Rapat	814.830.450	6 Rapat	855.571.973	6 Rapat	898.350.571	6 Rapat	943.268.100	6 Rapat	990.431.505
		16	13	Forum SEKWAN Regional Kalimantan	Jumlah Forum SEKWAN Regional Kalimantan yang dilaksanakan	1 kali/ 80 orang	1 kali/ 80 orang	135.835.700	1 kali/ 80 orang	142.627.485	1 kali/ 80 orang	149.758.859	1 kali/ 80 orang	157.246.802	1 kali/ 80 orang	165.109.142	1 kali/ 80 orang	173.364.599
		16	14	Penyusunan RENJA DPRD	Jumlah Dokumen Renja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	104.000.000	1 Dokumen	109.200.000	1 Dokumen	114.660.000	1 Dokumen	120.393.000	1 Dokumen	126.412.650	1 Dokumen	132.733.283

		16	15	Penyusunan Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD	Jumlah Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD yang disusun	50 Risalah dan Pidato	50 Risalah dan Pidato	265.205.000	50 Risalah dan Pidato	278.465.250	50 Risalah dan Pidato	292.388.513	50 Risalah dan Pidato	307.007.938	50 Risalah dan Pidato	322.358.335	50 Risalah dan Pidato	338.476.252
		16	16	Penerbitan Buletin Legislatif	Jumlah Buletin Legislatif yang tersedia	300 Eksemplar	300 Eksemplar	42.800.000	300 Eksemplar	44.940.000	300 Eksemplar	47.187.000	300 Eksemplar	49.546.350	300 Eksemplar	52.023.668	300 Eksemplar	54.624.851
		16	17	Pelayanan Administrasi Rapat BANMUS	Jumlah Rapat BANMUS yang difasilitasi	12 Kali/rapat	12 Kali/rapat	3.010.167.000	12 Kali/rapat	3.160.675.350	12 Kali/rapat	3.318.709.118	12 Kali/rapat	3.484.644.573	12 Kali/rapat	3.658.876.802	12 Kali/rapat	3.841.820.642
		16	18	Kliping Koran Kegiatan Anggota DPRD Prov. Kalbar	Jumlah Buku Kliping Koran kegiatan Anggota DPRD Prov. Kalbar	60 Buku	60 Buku	20.000.000	60 Buku	21.000.000	60 Buku	22.050.000	60 Buku	23.152.500	60 Buku	24.310.125	60 Buku	25.525.631
		16	19	Pelayanan Administrasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar	Jumlah Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang terlaksana	1 kali	1 kali	93.044.000	2 kali	97.696.200	2 kali	102.581.010	2 kali	107.710.061	2 kali	113.095.564	2 kali	118.750.342
		16	20	Pemeliharaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas	Jumlah Aplikasi Pemeliharaan Sistem Perjalanan Dinas	1 Aplikasi	1 Aplikasi	53.672.000	1 Aplikasi	56.355.600	1 Aplikasi	59.173.380	1 Aplikasi	62.132.049	1 Aplikasi	65.238.651	1 Aplikasi	68.500.584
		16	21	Penyediaan Jasa Medical Checkup Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Check Up	65 orang	65 orang	159.400.000	65 orang	167.370.000	65 orang	175.738.500	65 orang	184.525.425	65 orang	193.751.696	65 orang	203.439.281
		16	22	Pengamanan Asset DPRD	Jumlah Rumah Dinas Anggota DPRD yang diamankan	1 Rumah Dinas	1 Rumah Dinas	55.938.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

		16	23	Fasilitasi Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan Sumpah Janji	1 kali/ 65 orang	1 kali/ 65 orang	278.734.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16	24	Fasilitasi Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan Sumpah /Janji	4 Orang	4 Orang	169.512.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16	25	Pelayanan Administrasi Pelaporan LHKPN Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang tertib lapor LHKPN Anggota DPRD	65 orang	65 orang	28.000.000	65 orang	29.400.000	65 orang	30.870.000	65 orang	32.413.500	65 orang	34.034.175	65 orang	35.735.884
		16	26	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov. Kalbar	Jumlah rumah jabatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov. Kalbar yang tersedia	1 unit rumah jabatan	1 unit rumah jabatan	272.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah rumah jabatan yang difasilitasi Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangganya	1 unit rumah jabatan	1 unit rumah jabatan	549.416.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	28	Penyusunan Buku Memori DPRD Provinsi Kalbar	Jumlah Buku Memori DPRD Provinsi Kalbar yang tersedia	-	25 buku	53.083.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	29	Penyusunan Buku Profil DPRD	Jumlah Buku Profil DPRD yang tersedia	-	1000 buku	119.693.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		16	30	Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	Jumlah Laporan Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Laporan	1 Laporan	65.862.000	1 Laporan	69.155.100	1 Laporan	72.612.855	1 Laporan	76.243.498	1 Laporan	80.055.673	1 Laporan	84.058.456
		16	31	Pembuatan Emblem Emas Anggota DPRD Provinsi Kalbar	Jumlah Emblem Emas Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang disediakan	-	65 Buah	662.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	32	Pembuatan Papan Nama Meja Untuk Anggota DPRD	Jumlah Papan Nama Meja Anggota DPRD yang disediakan	-	130 Buah	195.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								<b>1.207.367.900</b>		<b>64.267.736.295</b>		<b>67.481.123.110</b>		<b>70.855.179.265</b>		<b>81.387.593.744</b>		<b>85.456.973.431</b>

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja akan menjadi acuan untuk menilai kinerja yang dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan, dan merupakan komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023. Berikut indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1

#### Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RENSTRA Tahun 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	78 (Sangat Baik)	81	82	83	84	85	85 (Memuaskan)

KETERANGAN (NILAI TARGET CAPAIAN SASARAN) :

SKOR	NILAI	INTERPRETASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI
> 85	AA	Memuaskan
> 75-85	A	Sangat Baik
> 65-75	B	Baik
> 50-65	CC	Cukup Baik
> 30-50	C	Agak Kurang
0-30	D	Kurang

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat (RENSTRA Sekretariat DPRD) Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang Kinerja Pelayanan, Isu-isu Strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya. Keberhasilan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari OPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah yang akan disusun setiap tahunnya.